



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

STATUS PTN-BH: PENAMBAHAN BEBAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Oleh :

AMANDA PUTRI

2010532036


Dosen Pembimbing :

Dr. Suhandi, S.E., M.Si., Ak, CA

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi**

PADANG

2024

	No. Alumni Universitas	AMANDA PUTRI	No. Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/11 Mei 2002 b) Nama Orang Tua: Ediwarman dan Sulastri c) Fakultas; Ekonomi dan Bisnis d) Jurusan: Akuntansi e) No BP: 2010532036 f) Tanggal Lulus: 1 Juli 2024 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3.78 i) Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan j) Alamat Orang Tua: Jl. Syech Sulaiman Arrasuli, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.</p>		
<p style="text-align: center;">Status PTN-BH: Penambahan Beban Kewajiban Perpajakan</p> <p style="text-align: center;">Skripsi oleh: Amanda Putri</p> <p style="text-align: center;">Pembimbing: Dr. Suhanda, S.E., M.Si., Ak, CA</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This research aims to understand the type of additional tax expense resulting from changing the status of a university to a State University with Legal Entity (PTN-BH). The data collection method used was interviews and literature study and then processed using thematic analysis with NVIVO software as a data management tool. The results show that the changing of status to PTN-BH provide autonomy and achieve efficiency in decision making but in the other side it creates various inefficiencies in the tax aspect. This can be seen from the addition of Tax Identification Numbers (NPWP), which has the impact of increasing the corporate income tax, changes the deduction of Income tax (PPh 21) rules and an increase in VAT which are the responsibility of universities as one of the non-profit organization operating in education sector.</i></p> <p>Keywords: Tax, Legal Entity State University.</p>			

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis penambahan beban perpajakan akibat perubahan status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka kemudian diolah menggunakan analisa tematik dengan bantuan software NVIVO sebagai alat manajemen data. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi PTN-BH memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mencapai keefisienan dalam pengambilan keputusan namun pada sisi lain menciptakan berbagai inefisiensi dalam aspek perpajakan. Hal ini terlihat dari adanya penambahan NPWP yang berdampak munculnya beban Pajak Penghasilan Badan, perubahan aturan pemotongan PPh 21 dan peningkatan PPN yang menjadi kewajiban perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan

Kata Kunci : Perpajakan, PTN-BH.

